



Kapabilitas Manajerial Dinamis Aparatur Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik

Dea Winada^{1*}, M. Yusuf², Uswatun Asiah³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: deawinadatambunan@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the dynamic managerial capabilities of village apparatus in the digital transformation of public services in Rengas Bandung Village and Simpang Sungai Duren Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi Regency. This research uses a qualitative descriptive method through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis framework applies nine indicators of dynamic managerial capabilities: sensing capability, seizing capability, innovation capability, integrative capability, empowering capability, innovation readiness, resource readiness, participatory and collaborative mindset, and strategic readiness. The findings show that both villages have begun implementing digitalization through the Village Information System, village websites, and social media, but remain in the early stages of development. Rengas Bandung Village demonstrates stronger analytical sensing and strategic planning orientation, while Simpang Sungai Duren Village shows more applicative implementation in daily public services. Both villages still face challenges including limited digital competencies among apparatus, unstable internet infrastructure, low community digital literacy, and the absence of integrated long-term digitalization planning.*

Keywords: *Digitalization; Dynamic Managerial Capabilities; Public Services; Village Apparatus; Village Information System.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kapabilitas manajerial dinamis aparatur desa dalam transformasi digital pelayanan publik di Desa Rengas Bandung dan Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis yang digunakan mencakup sembilan indikator kapabilitas manajerial dinamis: *sensing capability, seizing capability, innovation capability, integrative capability, empowering capability, innovation readiness, resource readiness, participatory and collaborative mindset, dan strategic readiness*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua desa telah mulai menerapkan digitalisasi melalui Sistem Informasi Desa, website desa, dan media sosial, namun masih berada pada tahap awal pengembangan. Desa Rengas Bandung menunjukkan kemampuan sensing yang lebih analitis dan orientasi perencanaan yang lebih strategis, sementara Desa Simpang Sungai Duren menampilkan implementasi yang lebih aplikatif dalam pelayanan sehari-hari. Kedua desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi digital aparatur, infrastruktur internet yang belum stabil, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum adanya perencanaan digitalisasi jangka panjang yang terintegrasi.

Kata kunci: Aparatur Desa; Digitalisasi; Kapabilitas Manajerial Dinamis; Pelayanan Publik; Sistem Informasi Desa.

1. LATAR BELAKANG

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Digitalisasi menjadi elemen penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan, membawa pengaruh besar di berbagai sektor. Digitalisasi merupakan perubahan format informasi dari analog menjadi digital agar bisa dikelola melalui perangkat teknologi (Christover et al., 2023; Wahdatulnisa & Nugraha, 2024).

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memicu transformasi yang besar di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan pemerintahan desa, sehingga mendorong desa-desa untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui mekanisme yang lebih efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Penerapan TIK dipandang sebagai strategi kunci untuk mencapai desa digital dan tata kelola cerdas, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui inisiatif seperti Sistem Informasi Desa (SID), Digitalisasi Desa Kemendesa, serta akselerasi transformasi digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Royani et al., 2025).

Proses digitalisasi di tingkat desa menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi geografis yang menciptakan kesenjangan infrastruktur, belum optimalnya kebijakan dan implementasi regulasi, rendahnya keterlibatan warga, serta birokrasi desa yang belum siap beralih dari cara kerja konvensional ke sistem berbasis digital (Kusuma et al., 2022). Aparatur desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal dituntut tidak hanya memahami penggunaan teknologi digital, tetapi juga mampu belajar, berinovasi, dan menyesuaikan pola kerja agar transformasi digital dapat berjalan efektif (Adila & Putri, 2024).

Konsep *dynamic managerial capabilities* menjadi relevan karena menekankan kemampuan organisasi dan aktor di dalamnya untuk mengintegrasikan, membangun, serta merekonfigurasi sumber daya dan kompetensi guna menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan eksternal secara berkelanjutan. Kemampuan manajerial dinamis merupakan kemampuan aparatur dalam mengelola perubahan secara strategis, mulai dari mengenali peluang dan tantangan, mengambil keputusan yang tepat, hingga menyesuaikan kembali sumber daya dan proses kerja organisasi (Asker & Mergel, 2022; Ernialdi et al., 2026).

Desa Rengas Bandung dan Desa Simpang Sungai Duren yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menjadi lokasi penelitian karena keduanya telah mulai mengadopsi digitalisasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan media sosial, meskipun masih menghadapi kendala kompetensi aparatur dan infrastruktur jaringan yang belum stabil. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antara kedua desa dengan desa lain di wilayah yang sama, sehingga penting untuk menganalisis *dynamic managerial capabilities* aparatur desa sebagai faktor penentu keberhasilan transformasi digital pemerintahan desa (Rajak et al., 2025; Fakhry, 2024).

Dari penjelasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana *dynamic managerial capabilities* aparatur desa dalam menghadapi digitalisasi pemerintahan desa, khususnya kemampuan *sensing*, *seizing*, dan *transforming*; serta mengidentifikasi pendorong dan penghambat dalam penerapan layanan berbasis digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Dynamic Managerial Capabilities

Dynamic managerial capabilities merupakan kapasitas individu maupun aparatur dalam mengidentifikasi dinamika lingkungan secara berkesinambungan, memanfaatkan peluang yang tersedia, serta melakukan penyesuaian dan penataan ulang terhadap sumber daya dan mekanisme kerja agar kinerja dan keberlangsungan organisasi tetap terjaga dalam kondisi yang berubah. Teori *Dynamic Capabilities* yang dikembangkan oleh Teece (2018) menegaskan bahwa *dynamic capabilities* bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan kemampuan manajerial dan organisasi tingkat tinggi yang memungkinkan suatu entitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan strategis, termasuk perubahan yang dipicu oleh digitalisasi.

(David J. Teece, 2009) menjelaskan bahwa *dynamic capabilities* terdiri atas tiga elemen utama: (1) sensing, yakni kemampuan mengidentifikasi peluang dan tantangan baru; (2) seizing, berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan strategis dan mengalokasikan sumber daya; dan (3) transforming, mencakup kemampuan melakukan perubahan struktural, proses, dan budaya organisasi. Selanjutnya, (Asker & Mergel, 2022) mengadaptasi kerangka tersebut dengan merumuskannya ke dalam sembilan indikator yang lebih operasional untuk menganalisis proses transformasi digital pada organisasi sektor publik, yaitu: *sensing capability*, *seizing capability*, *innovation capability*, *integrative capability*, *empowering capability*, *innovation readiness*, *resource readiness*, *participatory and collaborative mindset*, dan *strategic readiness*.

Aparatur Desa

Aparatur desa merupakan komponen sumber daya manusia dalam pemerintahan di tingkat desa yang menjalankan fungsi administratif, manajerial, dan pelayanan publik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparatur desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kualitas aparatur desa tidak hanya ditentukan oleh struktur jabatan, tetapi juga oleh kompetensi, dan profesionalisme selama menjalankan tugasnya, termasuk kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kebijakan dan teknologi (Dwiyanto, 2017).

Digitalisasi Desa

Digitalisasi desa dipahami sebagai bentuk penerapan e-government pada level pemerintahan paling bawah, yang menyesuaikan teknologi dengan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas desa (Indrajit, 2002). Digitalisasi desa mencakup lima dimensi penting: (1) pelayanan publik berbasis digital; (2) tata kelola pemerintahan yang transparan; (3)

infrastruktur teknologi; (4) sumber daya manusia yang kompeten; dan (5) partisipasi masyarakat. Keberhasilan digitalisasi desa sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi serta kapasitas aparatur desa selama menjalankan pembaruan tersebut secara strategis, adaptif, dan berkelanjutan (Mergel et al., 2019).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk menangkap fenomena secara menyeluruh dalam situasi alami, dengan menggambarkan secara rinci pengalaman subjek penelitian, termasuk persepsi, motivasi, perilaku, dan interaksi mereka (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2007). Lokasi penelitian adalah Desa Rengas Bandung dan Desa Simping Sungai Duren, dilaksanakan pada Februari–Maret 2026.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, dan operator desa) serta masyarakat desa, dan data sekunder berupa arsip desa, kebijakan pemerintah terkait Desa Digital, serta literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan pencatatan. Pengelolaan informasi memakai struktur analisis interaktif Miles dan Huberman (Bagong, 2005) yang terdiri dari tiga tahap: penyaringan data, penyajian informasi, dan pemeriksaan/penarikan kesimpulan. Kekuatan data dijamin melalui mekanisme triangulasi data dan triangulasi teknik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dynamic Managerial Capabilities Aparatur Desa dalam Digitalisasi

Sensing Capability

Sensing capability dimaknai sebagai kemampuan aparatur desa dalam mengenali peluang, kebutuhan, serta tantangan yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Rengas Bandung, aparatur desa menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap manfaat digitalisasi, baik dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, maupun kemudahan akses informasi. Sekretaris Desa menyampaikan:

“Digitalisasi memiliki peluang yang sangat besar dan bagus dalam meningkatkan kualitas pelayanan terutama kepada masyarakat. Dengan adanya sistem digital, proses pelayanan yang sebelumnya memakan waktu cukup lama dapat menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Hal ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa” (Wawancara, 30 Maret 2026).

Kepala Desa Rengas Bandung mengidentifikasi tantangan utama digitalisasi, meliputi rendahnya literasi digital masyarakat khususnya kelompok lansia dan keterbatasan anggaran. Aparatur desa juga mampu mengidentifikasi sumber kebutuhan digitalisasi dari berbagai arah, baik dari kebijakan pemerintah pusat maupun kebutuhan internal desa. Namun, dari perspektif masyarakat, proses sensing belum optimal karena minimnya sosialisasi langsung terkait digitalisasi.

Sementara itu, di Desa Simpang Sungai Duren, kemampuan sensing lebih terlihat pada pemanfaatan digitalisasi sebagai solusi atas keterbatasan geografis. Kepala Desa menyampaikan bahwa digitalisasi sangat membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi seperti KK yang dapat dicetak langsung di desa tanpa harus ke kabupaten yang jaraknya jauh. Namun, tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan data administrasi masih menjadi kendala utama.

Jika dibandingkan, Desa Rengas Bandung cenderung memiliki kemampuan sensing yang lebih analitis dan menyeluruh, karena tidak hanya mengidentifikasi peluang dan tantangan, tetapi juga memahami faktor pendorong perubahan secara lebih luas. Sebaliknya, Desa Simpang Sungai Duren menunjukkan kemampuan sensing yang lebih aplikatif. Kedua desa memiliki kelemahan serupa, yaitu belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini konsisten dengan (Alifah et al., 2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi desa mampu mempercepat pelayanan publik, namun masih menghadapi kendala infrastruktur dan rendahnya literasi digital.

Seizing capability

Seizing capability dimaknai sebagai kemampuan aparatur desa dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan peluang digitalisasi yang telah diidentifikasi. Di Desa Rengas Bandung, proses pengambilan keputusan terkait digitalisasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat dan musyawarah bersama aparatur desa. Kepala Desa menyampaikan:

“Dalam mengambil keputusan terkait penerapan sistem digital, kami tidak melakukannya secara sepihak. Prosesnya diawali dengan melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi pelayanan yang ada di desa, apakah memang sudah perlu didukung dengan sistem digital atau belum” (Wawancara, 17 Maret 2026).

Sementara itu, di Desa Simpang Sungai Duren, *Seizing capability* tercermin dari koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan strategi memfokuskan pengelolaan sistem pada satu operator khusus. Dari perspektif masyarakat, implementasi digitalisasi di kedua desa telah memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan akses

komunikasi. Desa Rengas Bandung lebih kuat dalam perencanaan strategis, sedangkan Desa Simpang Sungai Duren lebih unggul dalam implementasi operasional. Temuan ini sejalan dengan (Rizal et al., 2022) yang menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik desa diwujudkan melalui website desa dan aplikasi pelayanan administrasi.

Innovation capability

Innovation capability dimaknai sebagai kemampuan aparatur desa dalam mengembangkan dan menciptakan inovasi layanan berbasis digital. Di Desa Rengas Bandung, inovasi diwujudkan melalui pemanfaatan website desa, SID, serta media sosial yang mendukung efisiensi administrasi dan penyebaran informasi. Kaur Perencanaan menyampaikan bahwa dengan adanya website, data menjadi lebih terpusat dan mudah diakses, sehingga proses pelayanan lebih cepat dan tidak perlu input data berulang-ulang. Di Desa Simpang Sungai Duren, inovasi mencakup pemanfaatan SID dan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk pelayanan administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Jika dibandingkan, Desa Rengas Bandung lebih menonjol pada aspek pengembangan sistem dan kolaborasi internal aparatur, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan oleh masyarakat. Sebaliknya, Desa Simpang Sungai Duren menunjukkan pemanfaatan inovasi yang lebih dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses layanan dan komunikasi. Ini sejalan dengan (Huda et al., 2020) menjelaskan mengenai penggunaan platform digital mampu memperkuat koordinasi antara aparatur desa dan masyarakat.

Integrative Capability

Integrative Capability dimaknai sebagai kemampuan aparatur desa dalam mengoordinasikan berbagai pihak dan sumber daya untuk mendukung digitalisasi. Di Desa Rengas Bandung, pembagian tugas dilakukan sesuai kemampuan masing-masing perangkat desa dalam pengelolaan SID, website, dan media sosial, dengan koordinasi melalui grup WhatsApp. Di Desa Simpang Sungai Duren, integrasi terfokus pada penunjukan operator khusus sebagai pengelola utama sistem digital, yang secara rutin menyampaikan laporan kepada pimpinan desa.

Kedua desa menunjukkan kemampuan dalam mengintegrasikan sumber daya untuk mendukung digitalisasi, namun dengan pendekatan berbeda. Desa Rengas Bandung menggunakan pola pembagian tugas yang tersebar sesuai kemampuan aparatur, sedangkan Desa Simpang Sungai Duren memusatkan pengelolaan pada satu operator khusus. Temuan ini mendukung penelitian (Arduini et al., 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan

transformasi digital dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan dan mengintegrasikan sumber daya internal.

Empowering capability

Empowering capability diartikan sebagai kemampuan aparatur desa dalam memberdayakan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat, melalui pendampingan, pelatihan, serta pemberian pemahaman terkait teknologi digital. Di Desa Rengas Bandung, pemberdayaan dilakukan secara kolektif melalui pendampingan langsung di tempat kerja yang bersifat informal, serta pengenalan teknologi kepada masyarakat secara bertahap melalui media digital. Di Desa Simpang Sungai Duren, pemberdayaan lebih terpusat pada satu aktor utama yaitu operator desa yang aktif mengikuti pelatihan dari pemerintah kabupaten bahkan UIN.

Kedua desa belum optimal dalam memberdayakan masyarakat. Desa Rengas Bandung mengedepankan pemerataan pembelajaran melalui pendekatan kolaboratif, sedangkan Desa Simpang Sungai Duren menekankan penguatan kapasitas individu melalui pelatihan formal. Temuan penelitian (Qonita et al., 2025) menunjukkan kesiapan SDM melampaui kemampuan teknis dan mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif.

Innovation readiness

Innovation readiness dimaknai sebagai tingkat kesiapan dan keterbukaan aparatur desa terhadap perubahan dan inovasi digital. Di Desa Rengas Bandung, kesiapan berkembang secara bertahap: pada awalnya aparatur mengalami kesulitan karena terbiasa menggunakan sistem manual, namun seiring meningkatnya frekuensi penggunaan dan dukungan pelatihan, aparatur mulai terbiasa dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Di Desa Simpang Sungai Duren, *Innovation readiness* terlihat dari fokus peran pada operator desa yang sejak awal telah terbiasa dan memiliki tanggung jawab khusus.

Desa Rengas Bandung menunjukkan proses *Innovation readiness* yang bersifat bertahap dan melibatkan beberapa aparatur, sedangkan Desa Simpang Sungai Duren lebih menekankan kesiapan individu tertentu. Temuan ini mendukung (Rahmawati, 2024) yang menyatakan kesiapan aparatur desa menjadi faktor utama keberhasilan digitalisasi.

Resource readiness

Resource readiness diartikan sebagai kesiapan sumber daya pendukung digitalisasi, baik dari segi infrastruktur, anggaran, maupun sumber daya manusia. Di Desa Rengas Bandung, ketersediaan perangkat belum sepenuhnya memadai dan belum ada operator khusus, sehingga pengelolaan sistem digital dilakukan secara rangkap oleh aparatur lain. Di Desa Simpang Sungai Duren, ketersediaan perangkat relatif lebih baik, namun masih terdapat kekurangan

pada beberapa fasilitas seperti sistem kehadiran digital dan layanan pembuatan surat otomatis. Dari sisi masyarakat, kedua desa memiliki kondisi serupa: jaringan WiFi sudah cukup baik namun bergantung pada kestabilan pasokan listrik.

Perbedaan utama kedua desa terletak pada kesiapan sumber daya internal. Desa Simpang Sungai Duren lebih unggul dari sisi ketersediaan perangkat, sementara dari sisi infrastruktur jaringan keduanya hampir sama. Selaras dengan (Alifah et al., 2024) serta (Hutauruk et al., 2021) dengan menyatakan adanya hambatan utama digitalisasi desa berasal dari keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masyarakat.

Participatory and Collaborative Mindset

Participatory and Collaborative Mindset dimaknai sebagai kesiapan aparatur desa dalam melibatkan masyarakat serta menjalin kolaborasi dalam proses digitalisasi. Di Desa Rengas Bandung, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan website desa masih sekitar 30% dan didominasi kalangan muda. Namun aparatur desa bekerja sama dengan Kumpeh Host untuk mengatasi kendala teknis. Di Desa Simpang Sungai Duren, aspek kolaboratif terlihat dari keterlibatan mahasiswa magang sistem informasi yang membantu mengaktifkan kembali website desa yang sempat tidak berjalan.

Kedua desa belum optimal dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Desa Rengas Bandung menunjukkan pola kolaborasi yang lebih berkelanjutan, sedangkan Desa Simpang Sungai Duren memiliki kontribusi eksternal yang lebih situasional. Temuan ini mendukung (Huda et al., 2020) yang menjelaskan bahwa media sosial dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, namun partisipasi masyarakat masih belum merata.

Strategic readiness

Strategic readiness diartikan sebagai kesiapan desa dalam memiliki arah dan perencanaan yang jelas terkait digitalisasi. Di Desa Rengas Bandung, kesiapan strategis terlihat dari adanya perencanaan jangka panjang yang mulai diarahkan pada pengembangan pelayanan digital, termasuk pengalokasian anggaran desa secara bertahap untuk biaya pemeliharaan website dan SID. Kepala Desa menyampaikan: “Desa kami memang memiliki rencana jangka panjang dalam pengembangan pelayanan digital, dan hal tersebut sudah mulai kami arahkan dalam perencanaan anggaran desa.” Di Desa Simpang Sungai Duren, *Strategic readiness* ditunjukkan melalui rencana jangka panjang digitalisasi dan pengalokasian anggaran dari dana bagi hasil, meski masih dalam tahap pengembangan.

Jika dibandingkan, Desa Rengas Bandung memiliki kesiapan strategis yang relatif lebih matang karena telah mengintegrasikan digitalisasi ke dalam perencanaan dan didukung oleh kolaborasi eksternal yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan (Arduini et al., 2021) yang menegaskan transformasi digital membutuhkan kemampuan organisasi dalam merencanakan perubahan secara strategis.

Faktor Pendukung dan Penghambat Digitalisasi

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung utama implementasi digitalisasi di kedua desa meliputi: (1) dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program pelatihan dan penyediaan website desa; (2) ketersediaan infrastruktur dasar seperti komputer, laptop, dan WiFi; (3) kemauan aparatur desa untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi; serta (4) pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi alternatif yang menjangkau masyarakat lebih luas.

Sementara itu, faktor penghambat yang masih dominan meliputi: (1) keterbatasan kompetensi digital aparatur, dimana tidak semua perangkat desa mampu mengoperasikan sistem digital; (2) jaringan internet yang belum stabil, terutama ketika terjadi pemadaman listrik; (3) rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya kelompok lansia; (4) keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem; (5) belum terintegrasinya sistem digital secara menyeluruh; serta (6) budaya kerja aparatur yang masih cenderung konvensional.

Jika dibandingkan, Desa Simpang Sungai Duren menunjukkan tingkat implementasi digitalisasi yang relatif lebih maju dibandingkan Desa Rengas Bandung, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi dan kesiapan SDM operator. Namun demikian, kedua desa masih menghadapi tantangan yang serupa dan memerlukan penguatan kapasitas yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa *dynamic managerial capabilities* aparatur Desa Rengas Bandung dan Desa Simpang Sungai Duren dalam menghadapi digitalisasi pemerintahan desa sudah mulai berkembang, namun belum sepenuhnya optimal. Kedua desa telah berupaya menerapkan digitalisasi melalui SID, website desa, media sosial, serta penggunaan komputer dan internet. Desa Rengas Bandung cenderung memiliki kemampuan sensing yang lebih analitis, orientasi perencanaan yang lebih kuat, dan pendekatan yang lebih strategis. Sementara Desa Simpang Sungai Duren menunjukkan kemampuan implementasi yang lebih aplikatif dalam layanan sehari-hari, didukung adanya operator khusus yang kompeten.

Penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam mengenali perubahan, mengambil keputusan strategis, membangun kerja sama, dan menyesuaikan sumber daya organisasi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, digitalisasi desa pada dasarnya merupakan proses perubahan organisasi dan kapasitas aparatur, bukan sekadar penerapan teknologi semata.

Saran bagi pemerintah desa: meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital berkelanjutan, menyusun perencanaan digitalisasi yang lebih terarah dan terintegrasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bagi pemerintah daerah: memberikan dukungan yang lebih optimal melalui penyediaan infrastruktur digital, memperluas program pelatihan, dan mendorong integrasi sistem digital antar desa. Bagi peneliti selanjutnya: menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, memperluas cakupan desa penelitian, dan mengkaji dampak digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Adila, N., & Putri, L. D. M. (2024). Digitalisasi Tata Kelola SDM Aparatur di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Alifah, N., Izzati, N., & Azijah, D. N. (2024). Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Wancimekar Menuju Konsep Smart Village. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 6–13. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v15i1.627>
- Arduini, D., Denni, M., Lucchese, M., Nurra, A., & Zanfei, A. (2021). The role of technology, organization and contextual factors in the development of e-Government services: An empirical analysis on Italian Local Public Administrations. *Structural Change and Economic Dynamics*, 27, 177–189.
- Asker, A., & Mergel, I. (2022). The role of dynamic managerial capabilities and organizational readiness in smart city transformation. *Cities*, 129(October 2021), 103791. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103791>
- Bagong, S. (2005). Metode Penelitian Sosial. *Jakarta: Kencana Prenanda Media Group*.
- Christover, D., Hidayattulah, A. S., & Mawarni, I. (2023). Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 199–214.
- David J. Teece. (2009). *Dynamic Capabilities and Strategic Management*.
- Dwiyanto, A. (2017). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 539–556.

- Hutauruk, R. P., Juantara, B., & Fahmi, A. (2021). *Digital Transformation in Rural Governance : A Case Study of E- Government Implementation in Sukamakmur Village , Bogor*. 06(02), 87–92.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- Kusuma, T. P., Nurjaman, A., & Malawat, S. H. (2022). *Analisis tantangan dan potensi pengembangan digitalisasi desa*. 7(2), 100–114.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation : Results from expert interviews ☆. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. . (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Qonita, N. M., Nuraini, A., Damayanti, A., Farida, F. A., & Shela, M. P. (2025). *Optimalisasi kesiapan sdm publik menuju transformasi digital pelayanan yang inovatif dan adaptif*. 11(8).
- Rahmawati, A. D. (2024). *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri*.
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (e-government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76–91.